

LAPORAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAGETAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yaitu Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 2025
KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

SUWITO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV, c
NIP. 19731229 199412 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Kedudukan dan Susunan Organisasi | 5 |
| C. Tugas dan Fungsi Organisasi | 6 |
| D. Sumber Daya Organisasi | 7 |
| 1. Kepegawaian | 7 |
| 2. Sarana dan Prasarana | 9 |
| 3. Anggaran | 10 |
| E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah | 13 |
| F. Landasan Hukum | 16 |
| G. Sistematika Penyajian | 17 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 19 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 | 19 |
| 1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026 | |
| 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 | |
| 3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 | |
| 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 | |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2024 | 33 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 34 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 44 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 | 46 |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 46 |
| 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | 48 |
| 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 50 |
| 4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya | 52 |
| 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | 52 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 56 |
| B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 63 |
| C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 | 65 |
| D. Inovasi Tahun 2024 | 70 |
| E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024 | 73 |
| BAB IV PENUTUP | 75 |
| A. Simpulan | |
| B. Rencana Aksi Tahun 2025 | |
| LAMPIRAN | |
| A. Matriks Renstra terakhir | 84 |
| B. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya | 101 |
| C. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir | 104 |
| D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya | 112 |
| E. Pengukuran Kinerja | 116 |
| F. Pohon Kinerja | 117 |
| G. <i>Crosscutting</i> | 118 |
| H. <i>Cascading</i> | 120 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

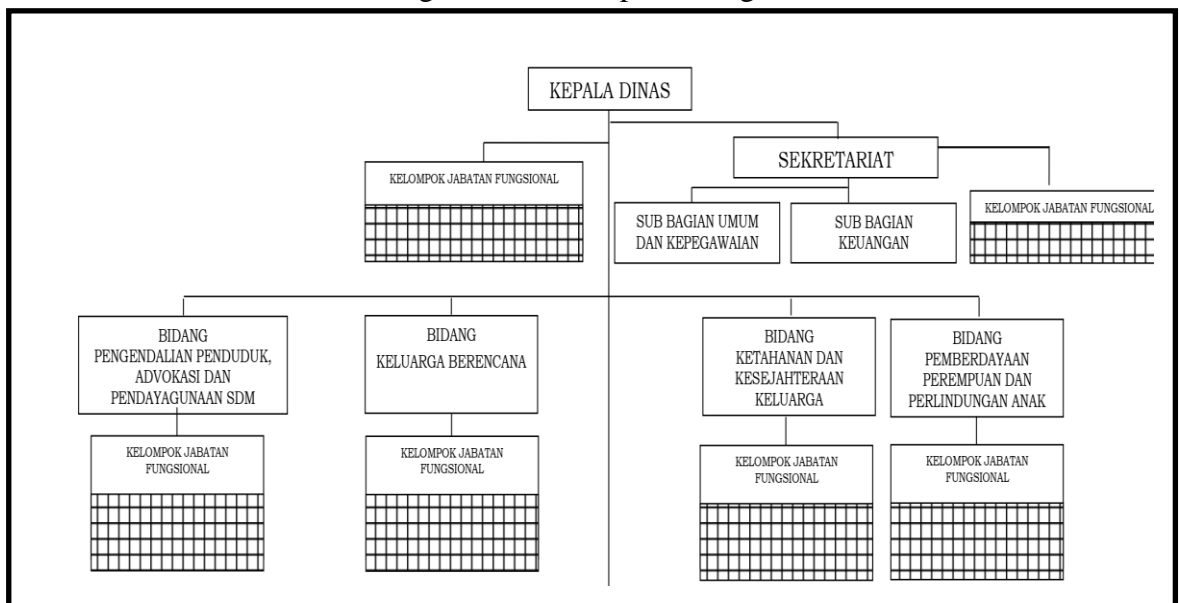
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada pasal 2 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada pasal 4 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

| No. | Jabatan | Kebutuhan (orang) | Realisasi (orang) | Kekurangan/Kelebihan (orang) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kepala Bidang | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 | 1 | -1 |

| No. | Jabatan | Kebutuhan (orang) | Realisasi (orang) | Kekurangan/Kelebihan (orang) |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 5 | JF Perencana Ahli Madya | 1 | 0 | -1 |
| 6 | JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya | 3 | 0 | -3 |
| 7 | JF Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | -1 |
| 8 | JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 8 | 5 | -3 |
| 9 | JF Perencana Ahli Pertama | 1 | 0 | -1 |
| 10 | JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | 8 | 0 | -8 |
| 11 | Penelaah Teknis Kebijakan | 8 | 3 | -5 |
| 12 | Fasilitator Pemerintahan | 1 | 0 | -1 |
| 13 | Pamong Pemerintahan | 1 | 0 | -1 |
| 14 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | 0 | -2 |
| 15 | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 | 0 | -2 |
| 16 | Pengolah Data Dan Informasi | 10 | 2 | -8 |
| 17 | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 3 | -2 |
| 18 | Operator Layanan Operasional | 16 | 0 | -16 |
| 19 | Pengelola Umum Operasional | 1 | 0 | -1 |
| | Jumlah | 76 | 19 | 57 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebutuhan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah sebanyak 76 orang. Sedangkan saat ini jumlah pegawai yang ada hanya 19 orang, sehingga kebutuhan akan pegawai sejumlah 57 orang.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah (orang) |
|-----|-------------------------|----------------|
| 1 | Pembina Utama/IV-d | - |
| 2 | Pembina Utama Muda/IV-c | - |
| 3 | Pembina Tk.I/IV-b | 1 |
| 4 | Pembina/IV-a | 5 |
| 5 | Penata Tk.I/III-d | 6 |
| 6 | Penata/III-c | 1 |
| 7 | Penata Muda Tk.I/III-b | 1 |
| 8 | Penata Muda/III-a | 4 |
| 9 |/II-d | 1 |
| 10 |/II-c | - |

| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah (orang) |
|-----|------------------------|----------------|
| 11 |/II-b | - |
| 12 |/IIa | - |
| | Jumlah | 19 |

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

| No. | Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|--------------------|----------------|
| 1 | Strata 3 | - |
| 2 | Strata 2 | 3 |
| 3 | Strata 1/Sederajat | 12 |
| 4 | Diploma | 1 |
| 5 | SMA/Sederajat | 3 |
| 6 | SMP/Sederajat | - |
| 7 | SD/Sederajat | - |
| | Jumlah | 19 |

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|-----|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 9 |
| 2 | Perempuan | 10 |
| | Jumlah | 19 |

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

| No. | Aset Tetap | Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp) | Mutasi Tahun 2024 | | Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp) |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | Tanah | Rp 121.504.304,- | - | - | Rp 121.504.304,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp 10.118.952.022,- | Rp 743.368.000,- | Rp 137.713.300,- | Rp 10.724.606.722,- |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp 5.350.258.174,- | Rp 1.935.171.772,- | | Rp 7.285.429.946,- |

| No. | Aset Tetap | Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp) | Mutasi Tahun 2024 | | Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp) |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 2.500.000,- | - | | Rp 2.500.000,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 565.236.000,- | - | | Rp 565.236.000,- |
| | Jumlah | Rp 16.158.450.500,- | Rp 2.678.539.772,- | Rp 137.713.300,- | Rp 18.699.276.972,- |

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.281.610.937,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | Pagu Anggaran Tahun 2024 |
|---|--|----------------|----------|--------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 | % | 965.396.800 |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 | Kegiatan | 235.000.000 |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 | Kegiatan | 730.396.800 |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71,9 | % | 5.959.601.137 |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | Pagu Anggaran Tahun 2024 |
|--|--|----------------|----------|--------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | 12 | Kegiatan | 1.554.403.200 |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 | % | 1.121.582.937 |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan | 100 | % | 2.951.865.000 |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 | % | 331.750.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 | % | 4.128.600.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | % | 797.800.000 |
| Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | % | 3.330.800.000 |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 43 | % | 170.000.000 |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 50.000.000 |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan | 2 | Dokumen | 120.000.000 |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | Pagu Anggaran Tahun 2024 |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100 | % | 300.000.000 |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Laporan | 300.000.000 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) | 76 | Skor | 100.000.000 |
| Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Kegiatan | 100.000.000 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 1 | Kegiatan | 200.000.000 |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 1 | Kegiatan | 120.000.000 |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | 1 | Kegiatan | 80.000.000 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kepuasan ASN DPPKBPPPA terhadap Layanan Kesekretariatan DPPKBPPPA | 80,5 | Skor | 5.604.581.805 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 14 | Dokumen | 125.000.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 87 | % | 2.925.681.805 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | Dokumen | 360.000.000 |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | Pagu Anggaran Tahun 2024 |
|---|---|----------------|---------|--------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Unit | 872.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | Dokumen | 1.101.900.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 163 | Unit | 220.000.000 |
| TOTAL | | | | 17.428.179.742 |

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil

kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait dengan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga.
 - 1) Meskipun TFR rendah tetapi unmetneed masih tinggi dan peserta KB MKJP rendah, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk kenaikan TFR. Pada tahun 2022, nilai TFR 2,10 akan tetapi nilai peserta MKJP hanya 31,64% dan unmetneed sebesar 9,29% dimana nilai unmetneed tersebut masih diatas target dari provinsi yaitu 8,40%.
 - 2) Peserta KB baru belum bisa dijadikan peserta tambahan pada peserta KB aktif, hal ini dikarenakan tingginya angka drop out/DO.
 - 3) Kualitas kepesertaan ber-KB masih rendah, hal ini terbukti dari rendahnya peserta KB MKJP yaitu sebesar 31,64% pada tahun 2022.
 - 4) Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan KB MOW dimana capaian pada tahun 2022 hanya 115 peserta dari target 160 peserta.
 - 5) Rendahnya partisipasi dan komitmen pria terhadap program KB, hal ini terlihat dari peserta KB pria yang masih sangat rendah yaitu sebesar 2,96% dibandingkan peserta KB Wanita sebesar 97,04%.
 - 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga masih rendah, hal ini terbukti dari jumlah PUS dengan masih adanya usia istri < 20 tahun.
 - 7) Kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi masih rendah, hal ini terbukti masih rendahnya peserta papsmear yaitu hanya 1,40% peserta pada tahun 2022
 - 8) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin, dimana pada tahun 2022 capaian KB pascasalin sebesar 84,49%.
 - 9) Masih minimnya sekolah yang sudah menerapkan program sekolah siaga kependudukan yaitu sebanyak 156 sekolah dari seluruh tingkatan sekolah yang ada (SD, SMP, SMA).
 - 10) Masih minimnya jumlah desa/ kelurahan yang sudah menjadi kampung keluarga berkualitas yaitu sebanyak 24 desa dari total 235 desa/kelurahan yang ada di

Kabupaten Magetan

b. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Masih rendahnya partisipasi remaja dalam pembinaan kesehatan reproduksi. Saat ini jumlah PIK Remaja sebanyak 189 kelompok terdiri dari kelompok jalur Pendidikan dan jalur masyarakat. Kelompok PIK Remaja yang aktif sebanyak 71 Kelompok, Kurang aktif sebanyak 89 Kelompok dan kelompok tidak aktif sebanyak 20 kelompok.
- 2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usia kawin pertama dibawah usia 20 tahun yaitu sebanyak 6,96% dari total perkawinan pada tahun 2022.
- 3) Masih banyak calon pengantin yang belum terdaftar lewat aplikasi elsimil yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 2022, dari total 2.994 calon pengantin, yang terdaftar pada aplikasi hanya sebanyak 2.354 atau 78,6%.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko stunting.
- 5) Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan. Prevalensi stunting Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebesar 17,2% dan pada tahun 2022, berdasarkan hasil studi SSGI angka stunting kabupaten Magetan 14,9%.

c. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.
- 2) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif yaitu sebesar 15,55% pada tahun 2022, nilai tersebut masih dibawah target capain nasional sebesar 30%.
- 3) Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai pimpinan dalam lembaga, institusi lainnya. Saat ini pejabat dalam Lembaga dan instansi di dominasi oleh laki-laki dibanding perempuan.
- 4) Masih rendahnya kontribusi atau sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- 5) Kurangnya pemberdayaan terhadap lansia perempuan
- 6) Kurangnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas perempuan

d. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Masih rendahnya perempuan korban kekerasan yang melapor pada instansi yang

berwenang. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan pada tahun 2022 hanya sebanyak 23 kasus.

2) Masih banyaknya perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan

e. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1) Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak melalui media sosial.

2) Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Perumusan Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas kepesertaan ber-KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari rendahnya peserta KB MKJP
2. Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan KB MOW
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko stunting.
5. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan.
6. Masih minimnya sekolah yang sudah menerapkan program sekolah siaga kependudukan yaitu sebanyak 156 sekolah dari seluruh tingkatan sekolah yang ada (SD, SMP, SMA).
7. Masih minimnya jumlah desa/ kelurahan yang sudah menjadi kampung keluarga berkualitas yaitu sebanyak 24 desa dari total 235 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.
9. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif
10. Masih rendahnya perempuan korban kekerasan yang melapor pada instansi yang berwenang..
11. Masih banyaknya perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan
12. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak melalui media sosial.
13. Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 tanggal 1 Februari 2025

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

| | |
|----------|---|
| | utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. |
| BAB IV | PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. |
| LAMPIRAN | 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan Tahun 2024 - 2026

| |
|---|
| Tujuan ke-2 RPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| • Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| Sasaran RPD: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
| • Indikator : Indeks Kesehatan Masyarakat |
| Strategi RPD : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan |
| Arah Kebijakan RPD : Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam perencanaan keluarga sejahtera |
| Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD: |
| 1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera |
| 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana |
| Tujuan OPD: Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| • Indikator : Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) |
| • Indikator : Indeks Ketimpangan Gender |
| • Indikator : Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) |
| Sasaran OPD: |
| 1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk |
| • Indikator : Total Fertility Rate (TFR) |

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indek Peberdayaan Gender (IDG) 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Rasio KDRT 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya 6. Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA • Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA |
|---|

1. Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Tujuan yang didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu Tujuan RPD ke-2 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing serta mendukung Sasaran RPD ke-1 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan dan Arah Kebijakan Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam perencanaan keluarga sejahtera.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2025

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA | | |
|-----|---|---------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan | | <ul style="list-style-type: none"> • Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) • Indeks Ketimpangan Gender • Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | <p>Angka</p> <p>Angka</p> <p>Skor</p> | 0,61 | 0,60 | 0,58 |
| | | | | | 0,171 | 0,168 | 0,166 |
| | | | | | 700 | 700 | 700 |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA | | |
|----|-------------------|---|---|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
| | Perlindungan Anak | | | | | | |
| | | 1.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,085 | 2,08 | 2,07 |
| | | 1.2 Meningkatkan Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Angka | 64,5 | 65 | 65,5 |
| | | 1.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | Angka | 72,1 | 72,15 | 72,2 |
| | | 1.4 Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | Rasio | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 |
| | | 1.5 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | % | 0,837 | 0,827 | 0,817 |
| | | 1.6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA | Skor | 87 | 88,5 | 90 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA | Skor | 83,95 | 83,97 | 84 |

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak periode 2024-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 20xx-20xx

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2025

| VISI : Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| MISI : | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui advokasi dan pemberdayaan sdm 3. Meningkatkan manajemen pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB serta kesehatan reproduksi 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Advokasi Terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR | Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat |
| | | Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina | Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| | | Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia | |
| | | Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk menjadi peserta KB dan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga | Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS |
| | | Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB. | Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| | | Peningkatan advokasi dan KIE kepada stakeholder dan perempuan seksual aktif tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks (papsmear) | Meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan untuk deteksi dini kanker serviks (papsmear) |
| | 2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Peningkatan fungsi dan peran program Generasi Berencana (GenRe) melalui tiga komponen yaitu PIK Remaja (PIK-R), Saka Kencana dan Duta GenRe | Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran catin, ibu hamil, ibu pasca salin | Orientasi dan pelatihan kepada Tim Pendamping keluarga dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran serta pencatatan dan pelaporan |
| | | Optimalisasi kegiatan Minilokakarya dan Audit Kasus Stunting dengan melibatkan TPPS, TPK, Tim Teknis dan Tim Pakar | Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait kegiatan Minilokakarya Stunting dan Audit Kasus Stunting |
| | | Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah pendukung percepatan penurunan stunting di Magetan |
| | | Optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan edukasi terkait ATM dan dampaknya terhadap risiko stunting | Meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ATM (Aids, Tuberkulosis, Malaria) |
| | | Peningkatan Advokasi pada SSK | Meningkatnya sekolah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan |
| | | Peningkatan kompetensi pengelola Sekolah Siaga Kependudukan | Meningkatnya Kualitasa Sekolah Siaga Kependudukan |
| | | Peningkatan Advokasi pada Kampung KB | Meningkatnya desa atau kelurahan menjadi kampung Keluarga Berkualita |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Peningkatan Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) |
| | | Optimalisasi pendataan keluarga dalam menyajikan data dasar yang menggambarkan kondisi riil keluarga, sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pengentasan Kemiskinan | Meningkatkan kontribusi pendataan keluarga dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) |
| | 3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Meningkatkan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan | Peningkatan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan |
| | | Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. | Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan. |
| | | Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya | Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya |
| | | Peningkatan kapasitas perempuan dalam Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD | Pelibatan perempuan dalam Kursi yang duduk di DPRD |
| | 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta | Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan. |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| | | pemulangan dan reintegrasi sosial. | |
| | | Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA | Pemenuhan hak anak dengan fokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak. |
| | 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak | Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak |

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
 tahun 2024 - 2026

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | PENJELASAN | | |
|--|----------------------|---|--------|--|---|------------------------------|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Penduduk | 1.1 | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun) | $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $i = \text{Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun}$ ASFR _i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i | BKKBN Provinsi Jawa Timur |
| Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Keluarga | 2.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Angka | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi Ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga | $i\text{Bangga} = \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan Keluarga}) \times 100$ | BKKBN Provinsi Jawa Timur |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | PENJELASAN | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------|---|---|----------------------------|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Pengaruhutamaan Gender | 3.1 | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | Angka | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran untuk menilai kesetaraan kesempatan dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. | $IDG = \frac{1}{3} \times (E + P + I)$ $= \frac{1}{3} \times ((P_{prof} + P_{manaj})/2 + K_{perempuan} / K_{total} + (Y_{perem} / Y_{(laki-laki)}) / 1)$ <p>E (Indeks Partisipasi Ekonomi) Pprof = Proporsi perempuan dalam pekerjaan professional dan teknis Pmanaj = Proporsi perempuan dalam pekerjaan administratif dan manajerial</p> <p>P (Indeks Partisipasi Politik) Kperempuan = Jumlah kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan Ktotal = Jumlah total kursi parlemen</p> <p>I (Indeks Penguasaan Sumber Daya</p> | BPS Provinsi Jawa Timur |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | PENJELASAN | | |
|---|----------------------|--|--------|----------------------|--|-------------|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| | | | | | Ekonomi) Yperempuan = Pendapatan Perkapita Perempuan yang disesuaikan Ylaki-laki = Pendapatan Perkapita Laki-laki yang disesuaikan | |
| Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | 4.1 | Rasio KDRT | Angka | | Rasio KDRT = $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ | |
| Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | 5.1 | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | Angka | | % Anak yang tidak Terpenuhi Hak nya = $\frac{\text{Jumlah Anak yang TidakTerpenuhi Hak nya}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$ | |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024-2025

B. RENCANA KERJA Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SAT. | TARGET |
|-----------|---|----------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | <ul style="list-style-type: none"> • Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) • Indeks Ketimpangan Gender • Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | Angka Angka Skor | 0,60 0,168 700 |
| | | 1.1 | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,08 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Angka | 64,8 |
| | | 1.3 | Meningkatnya Pengarusutamaan | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | Angka | 72,10 |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SAT. | TARGET |
|-----|--------|---|---|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | an Gender | | | |
| | | 1.4 Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | Rasio | 0,02 - 0,05 |
| | | 1.5 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | % | 0,837 |
| | | 1.6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggara n Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA | Skor | 87,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA | Skor | 83,95 |

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO | TUJUAN & SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | 2,08 | Angka |
| 2 | Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) | 24,72 | Angka |
| 3 | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 80,75 | Angka |
| 4 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | a. Rasio KDRT b. Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | a. 0,02 – 0,05 b. 700 | a. 0,02 – 0,05 b. Skor |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80, 50 | Skor |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan :

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|-----------|---|--|---------------|----------------------|
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 % | 965.396.800 |
| 1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Kegiatan | 235.000.000 |
| 2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 Kegiatan | 730.396.800 |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71,9 % | 5.959.601.137 |
| 3 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | 12 Kegiatan | 1.554.403.200 |
| 4 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 % | 1.121.582.937 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN |
|-----------|--|--|---------------|----------------------|
| 5 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan | 100 % | 2.951.865.000 |
| 6 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 % | 331.750.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 % | 4.128.600.000 |
| 7 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 % | 797.800.000 |
| 8 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 % | 3.330.800.000 |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 43 % | 170.000.000 |
| 9 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 50.000.000 |
| 10 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 120.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100 % | 300.000.000 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN |
|-----------|---|--|-------------------|----------------------|
| 11 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 300.000.000 |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) | 76 Skor | 100.000.000 |
| 12 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 100.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 1 Kegiatan | 200.000.000 |
| 13 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 1 Kegiatan | 120.000.000 |
| 14 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | 1 Kegiatan | 80.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kepuasan ASN DPPKBPPPA terhadap Layanan Kesekretariatan DPPKBPPPA | 80,5 Skor | 5.604.581.805 |
| 15 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 14 Dokumen | 125.000.000 |
| 16 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 87 % | 2.925.681.805 |
| 17 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 360.000.000 |
| 18 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Unit | 872.000.000 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN |
|--------------|---|---|------------|-----------------------|
| 19 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Dokumen | 1.101.900.000 |
| 20 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 163 Unit | 220.000.000 |
| TOTAL | | | | 17.428.179.742 |

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran n, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO | TUJUAN & SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 | Angka |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|-------|
| 2 | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,50 | Angka |
| 3 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72,10 | Angka |
| 4 | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | Angka |
| 5 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837 | % |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87,00 | Skor |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | Skor |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|------------|---|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 43 % | 170.000.000 |
| | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakanrn Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 50.000.000 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|-----|---|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 120.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100 korban | 300.000.000 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 300.000.000 |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk Tercapainya KLA | 76 % | 100.000.000 |
| | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 1 kegiatan | 200.000.000 |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 1 kegiatan | 120.000.000 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | 1 kegiatan | 80.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA | 80 Skor | 5.415.787.500 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 14 Dokumen | 128.803.000 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|-----|---|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 87 % | 2.779.113.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Paket | 430.421.500 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | 872.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 967.150.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 164 Unit | 238.300.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 % | 1.007.622.300 |
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Kegiatan | 235.000.000 |
| | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 Dokumen | 772.622.300 |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71,9 % | 5.959.601.137 |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | 12 Dokumen | 1.554.403.200 |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 % | 2.421.549.937 |
| | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan | 100 % | 1.651.898.000 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|--------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 % | 331.750.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 % | 4.128.600.000 |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 % | 797.800.000 |
| | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 % | 3.330.800.000 |
| TOTAL | | | | 17.281.610.937 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

| No | Nilai Capaian Kinerja | | Kategori |
|----|-----------------------|--|-----------------|
| | % | Keterangan Persentase | |
| 1. | ≥ 100% | Sama dengan atau lebih dari 100 persen | Sangat Berhasil |
| 2. | 75% s.d < 100% | Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Berhasil |
| 3. | 55% s.d < 75% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen | Cukup Berhasil |
| 4. | < 55% | Di bawah lima puluh lima persen | Kurang Berhasil |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 | *Nilai belum ada | - | - | BKKBN Provinsi Jawa Timur |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,50 | 65,92 | 102,20% | Sangat Berhasil | BKKBN Provinsi Jawa Timur |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|---|--|-------------|------------------|-----------|-----------------|--|
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72,10 | *Nilai belum ada | - | - | BPS Provinsi Jawa Timur |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | 0,014 | 130% | Sangat Berhasil | Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837 | 0,623 | 125,57% | Sangat Berhasil | Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87,00 | 94,83 | 109% | Sangat Berhasil | LHE Inspektorat |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 83,99 | 100,05% | Sangat Berhasil | eSKM |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

- Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Nilai TFR ideal untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang ideal adalah 2,1 yang berarti setiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. Nilai TFR yang terlalu tinggi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cepat sedangkan TFR yang terlalu rendah menyebabkan penurunan jumlah penduduk.

- **Indeks Pembangunan Keluarga**

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pada Tahun 2024 capaian iBangga Kabupaten Magetan adalah 65,92 sehingga termasuk dalam kategori Pembangunan keluarga cukup baik (Berkembang).

- **Indeks Pemberdayaan Gender**

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Keadilan gender terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan Perempuan.

- **Rasio KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang di dalam rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2024 capaian rasio KDRT Kabupaten Magetan adalah sebesar 0,014 yang dapat digambarkan bahwa pada setiap 100.000 keluarga terdapat 1,4 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- **Persentase Anak yang Tidak Terpenuhi Hak-nya**

Terdapat empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di Kabupaten Magetan masih terdapat beberapa kasus anak yang tidak terpenuhi hak-nya, hal ini terlihat dari capaian persentase anak yang tidak terpenuhi hak nya sebesar 0,623% dari total keseluruhan anak yang ada di Kabupaten Magetan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------|------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,14 | 2,10 | 101,87% | 2,09 | 2,09 | 100% | 2,085 | *Nilai belum ada | - |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | - | 58,55 | - | - | 64,29 | - | 64,50 | 65,92 | 102,20% |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 61,38 | 71,45 | 116,41% | 70,51 | 72,08 | 102,23% | 72,10 | *Nilai belum ada | - |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,04 | 0,02 | 150 | 0,02-0,05 | 0,0189 | 105,5% | 0,02 – 0,05 | 0,014 | 130% |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | - | - | - | - | - | - | 0,837 | 0,623 | 125,57% |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | - | 77,30 | - | - | 85,95 | - | 87,00 | 94,83 | 109% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80,5 | 80,794 | 100,37% | 80,05 | 83,91 | 104,24% | 83,95 | 83,99 | 100,05% |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024, capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) sebesar 65,92 menunjukkan tren yang positif sejak 2 tahun sebelumnya yaitu 54,55 pada tahun 2022 dan 64,29 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dari sisi kebahagiaan, ketentraman dan kemandirian keluarga di Kabupaten Magetan terus meningkat, sehingga tujuan dari Pembangunan keluarga tercapai.

Peningkatan capaian kinerja juga dapat dilihat dari capaian rasio KDRT dimana pada tahun 2023 capaian rasio KDRT sebesar 0,02 dan pada tahun 2024 sebesar 0,014 pada tahun 2024. Rasio KDRT merupakan indikator negative sehingga semakin kecil nilai yang dicapai maka semakin baik, artinya semakin sedikit kasus KDRT yang terjadi pada keluarga/rumah tangga.

Indikator Persentase pemenuhan hak nak merupakan indikator yang baru pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sehingga belum terdapat angka capaian pada tahun sebelumnya. Akan tetapi capaian atas indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik dilihat dari capaian yang telah melampaui target, yaitu dari target 0,837% tercapai 0,637%.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

| No . | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir renstra | Tingkat Kemajuan |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | *Nilai belum ada | 2,07 | |
| 2 | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 65,92 | 65,50 | 100,64% |
| 3 | Meningkatnya Pengarusutamaan | Indek Peberdayaan | *Nilai belum ada | 72,20 | |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir renstra | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| | Gender | Gender (IDG) | | | |
| 4 | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,014 | 0,02-0,05 | 130,00% |
| 5 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,623 | 0,817 | 123,75% |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 94,83 | 90,00 | 105,37% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,00 | 84,00 | 100,00% |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Dari tabel 3.4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 keseluruhan indikator sasaran telah mencapai target akhir Rencana Strategis 2024-2026 yang telah disusun. Bahkan terdapat beberapa indikator yang telah tercapai melebihi target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerjanya. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan meningkatkan kinerja maka diperlukan adanya penguatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain | % Capaian |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 65,92 | 62,7 | 105,14% |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024 ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Magetan lebih tinggi daripada Pembangunan keluarga Provinsi Jawa Timur dengan capaian 105,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan keluarga yang ada di Kabupaten Magetan yang diukur dari dimensi kemandirian, kebahagiaan dan ketentraman yang lebih baik daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu dengan status Pembangunan keluarga berkembang.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Penyebab Keberhasilan/Kegagalan |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 | *Nilai belum ada | - | Penggunaan dan efektifitas kontrasepsi serta menurunnya usia kawin pertama wanita |

| | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|---------|--|
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,50 | 65,92 | 102,20% | Meningkatnya kualitas kelompok-kelompok Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72,10 | *Nilai belum ada | - | Semakin banyaknya kesempatan yang terbuka untuk perempuan |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | 0,014 | 130% | Semakin banyaknya Masyarakat yang sadar untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837 | 0,623 | 125,57% | Tercapainya penurunan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan dokumen adminduk kepada anak |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87,00 | 94,83 | 109% | Pemenuhan Dokumen SAKIP yang tepat waktu |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 83,99 | 100,05% | Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2024, capaian iBangga adalah sebesar 65,92. Hal ini didukung oleh Penyebab keberhasilan adalah meningkatnya kualitas kelompok-kelompok Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dengan adanya Sekolah-sekolah Orang tua Hebat pada kelompok BKB di Desa-desa dan Sekolah Lansia Tangguh pada kelompok BKL di sebagian Desa. Selain itu juga peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok-kelompok PIK Remaja di Sekolah-sekolah dan Desa-desa, adanya Duta Genre di tingkat Desa, kecamatan maupun Kabupaten. Ada juga peningkatan kualitas

Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui kelompok-kelompok UPPKA melalui kegiatan pameran produk unggulan UPPKA, Pelatihan ketrampilan bagi kelompok-kelompok UPPKA dan pemberian ATTG bagi kelompok UPPKA.

Selanjutnya untuk rasio KDRT yang di capai Kabupaten Magetan pada Tahun 2024 menunjukkan angka yang relative rendah yaitu 0,014. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya Masyarakat yang sadar untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan. Dengan terlapornya tidak kekerasan sehingga kasus tersebut dapat terdampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh stakeholder yang berwenang. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan juga terus ditingkatkan dengan menyasar pada berbagai lapisan Masyarakat.

Penurunan rasio KDRT juga berkaitan pada penurunan persentase anak yang tidak terpenuhi haknya yaitu menurunnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Hal ini mendukung pemenuhan salah satu hak dasar anak yaitu hak perlindungan. Pada tahun 2024 capaian persentase anak yang tidak terpenuhi haknya adalah sebesar 0,637%. Selain itu pemenuhan terhadap terhadap hak anak juga didukung oleh pemenuhan administrasi kependudukan anak, penyediaan sarana Pendidikan yang layak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja | Alternatif Solusi |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | Adanya kelompok masyarakat yang tidak mau melakukan KB dengan alasan budaya dan agama | Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pendekatan dengan tokoh agama |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja | Alternatif Solusi |
|---|--|--|---|
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Masih adanya sebagian keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia belum tergabung dalam kelompok BKB, BKR dan BKL | Menugaskan kepada para Penyuluh KB, Kader-kader KB untuk meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan BKB, BKR dan BKL. |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | Masih kurangnya peran perempuan di bidang ekonomi, politik, Hukum dan pengambilan keputusan | Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kaum perempuan di bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | Sebagian besar masyarakat masih menganggap tabu dan tidak berani melapor | Sosialisasi dan Advokasi kepada masyarakat untuk berani melapor apabila terjadi tindak kekerasan |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | Masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Hak-hak Anak | Terpenuhinya Pemenuhan Hak anak melalui penurunan kasus keekrasan, pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi Anak berhadapan dengan Hukum ke sekolah |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | Keterkaitan antar dokumen perencanaan | Konsistensi dan keselarasan isi dalam penyusunan antar dokumen SAKIP |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persyaratan dan prosedur pemberian layanan yang masih belum dipahami Masyarakat. | Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan |

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | *Nilai belum ada | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100% | 1.007.622.300 | Menunjang |
| | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 100% | 235.000.000 | Menunjang |
| | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 100% | 772.622.300 | Menunjang |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 101% | 5.959.601.137 | Menunjang |
| | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam | 100% | 1.554.403.200 | Menunjang |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---|--|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | | Pencitraan Program KKBPK | | | |
| | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100% | 2.421.549.937 | Menunjang |
| | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan | 100% | 1.651.898.000 | Menunjang |
| | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100% | 331.750.000 | Menunjang |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga | 102,20% | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 100% | 4.128.600.000 | Menunjang |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|--|-----------|---------------|----------------------------|
| | (iBangga) | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | 797.800.000 | Menunjang |
| | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | 3.330.800.000 | Menunjang |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | *Nilai belum ada | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 105% | 170.000.000 | Menunjang |
| | | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakanrn Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% | 50.000.000 | Menunjang |
| | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan | 100% | 120.000.000 | Menunjang |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|---|-------------------|-----------|--|--|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 130% | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100% | 300.000.000 | Menunjang |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% | 300.000.000 | Menunjang |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 100% | 200.000.000 | Menunjang |
| | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 100% | 120.000.000 | Menunjang |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|--|--|-----------|---|--|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | 100% | 80.000.000 | Menunjang |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 125,57% | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk Tercapainya KLA | 87% | 100.000.000 | Menunjang |
| | | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota | 100% | 100.000.000 | Menunjang |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP | Nilai SAKIP | 109% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA | 100% | 5.415.787.500 | Menunjang |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100,05% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 100% | 128.803.000 | Menunjang |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----------------|--------------------------|------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| dan PA | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 110% | 2.779.113.000 | Menunjang |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 430.421.500 | Menunjang |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan | 100% | 872.000.000 | Menunjang |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 967.150.000 | Menunjang |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 100% | 238.300.000 | Menunjang |

Dari Tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang dalam pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing indikator program dan kegiatan yang rata-rata telah tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

| No. | Program/Kegiatan | Bidang Pengampu | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Capaian |
| I | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | PPPA | 170.000.000 | 162.182.490 | 95,40% |
| 1 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | PPPA | 50.000.000 | 47.330.450 | 94,66% |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | PPPA | 120.000.000 | 114.852.040 | 95,71% |
| II | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | PPPA | 300.000.000 | 282.477.100 | 94,16% |
| 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PPPA | 300.000.000 | 282.477.100 | 94,16% |
| III | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | 100.000.000 | 94.338.000 | 94,34% |

| No. | Program/Kegiatan | Bidang Pengampu | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Capaian |
| 4 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | PPPA | 100.000.000 | 94.338.000 | 94,34% |
| IV | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | PPPA | 200.000.000 | 191.591.050 | 95,80% |
| 5 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | PPPA | 120.000.000 | 116.929.800 | 97,44% |
| 6 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PPPA | 80.000.000 | 74.661.250 | 93,33% |
| V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT | 5.415.787.500 | 5.215.654.997 | 96,30% |
| 7 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SEKRETARIAT | 128.803.000 | 114.795.607 | 89,12% |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | SEKRETARIAT | 2.779.113.000 | 2.750.110.975 | 98,96% |
| 9 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | SEKRETARIAT | 430.421.500 | 412.434.269 | 95,82% |
| 10 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | SEKRETARIAT | 872.000.000 | 852.516.322 | 97,77% |
| 11 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | SEKRETARIAT | 967.150.000 | 852.976.503 | 88,19% |
| 12 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | SEKRETARIAT | 238.300.000 | 232.821.321 | 97,70% |
| VI | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | PPAPS | 1.007.622.300 | 977.102.949 | 96,97% |
| 13 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | PPAPS | 235.000.000 | 227.960.000 | 97,00% |
| 14 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah | PPAPS | 772.622.300 | 749.142.949 | 96,96% |

| No. | Program/Kegiatan | Bidang Pengampu | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Capaian |
| | Kabupaten/Kota | | | | |
| VII | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | KB | 5.959.601.137 | 5.569.527.444 | 93,45% |
| 15 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | KB | 1.554.403.200 | 1.459.519.494 | 93,90% |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | KB | 2.421.549.937 | 2367176650 | 97,75% |
| 17 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | KB | 1.651.898.000 | 1412831250 | 85,53% |
| 18 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | KB | 331.750.000 | 330.000.050 | 99,47% |
| VIII | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | K3 | 4.128.600.000 | 4.082.797.150 | 98,89% |
| 19 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | K3 | 797.800.000 | 768.947.400 | 96,38% |
| 20 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | K3 | 3.330.800.000 | 3.313.849.750 | 99,49% |
| TOTAL | | | 17.281.610.937 | 16.575.671.180 | 95,92% |

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|---|--|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 | *Nilai belum ada | - | 6.967.223.437 | 6.546.630.393 | 93,96% | - |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,5 | 65,92 | 102,20% | 4.128.600.000 | 4.082.797.150 | 98,89% | 3,24% |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | 72,1 | *Nilai belum ada | - | 170.000.000 | 162.182.490 | 95,40% | - |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | 0,014 | 130% | 500.000.000 | 474.068.150 | 94,81% | 27,07% |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837 | 0,623 | 125,57% | 100.000.000 | 94.338.000 | 94,34% | 24,87% |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87 | 94,83 | 109% | 5.415.787.500 | 5.215.654.997 | 96,30% | 11,65% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 83,99 | 100,05% | | | | |

**Realisasi Total Fertility Rate (TFR) menunggu realease dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu realease dari BPS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan tabel 3.10 diatas bisa dilihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah melaksanakan kerjanya dengan baik dilihat dari capaian kerjanya yang rata-rata diatas 100%. Namun demikian pencapaian kinerja tersebut tetap di iringi dengan efisiensi atas alokasi anggaran dengan nilai efisiensi tertinggi sebesar

27,07% yaitu dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|------------|--|-------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Capaian | |
| I | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 43 | 45.166 | 105.04% | 170,000,000 | 162,182,490 | 95.40% | 9.17% |
| 1 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 100.00% | 50,000,000 | 47,330,450 | 94.66% | 5.34% |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 120,000,000 | 114,852,040 | 95.71% | 4.29% |
| II | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 100 | 100 | 100.00% | 300,000,000 | 282,477,100 | 94.16% | 5.84% |
| 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 300,000,000 | 282,477,100 | 94.16% | 5.84% |
| III | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 76 | 66 | 86.84% | 100,000,000 | 94,338,000 | 94.34% | -8.63% |

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----------|---|-------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | Target | Realisa | % | Anggaran | Realisasi | % | |
| 4 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 100,000,000 | 94,338,000 | 94.34% | 5.66% |
| IV | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1 | 1 | 100.00% | 200,000,000 | 191,591,050 | 95.80% | 4.20% |
| 5 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 120,000,000 | 116,929,800 | 97.44% | 2.56% |
| 6 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 80,000,000 | 74,661,250 | 93.33% | 6.67% |
| V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 80 | 80 | 100.00% | 5,415,787,500 | 5,215,654,997 | 96.30% | 3.70% |
| 7 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14 | 14 | 100.00% | 128,803,000 | 114,795,607 | 89.12% | 10.88% |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 87 | 95.92 | 110.25% | 2,779,113,000 | 2,750,110,975 | 98.96% | 10.25% |
| 9 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | 12 | 100.00% | 430,421,500 | 412,434,269 | 95.82% | 4.18% |
| 10 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | 1 | 100.00% | 872,000,000 | 852,516,322 | 97.77% | 2.23% |
| 11 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 12 | 100.00% | 967,150,000 | 852,976,503 | 88.19% | 11.81% |
| 12 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 164 | 164 | 100.00% | 238,300,000 | 232,821,321 | 97.70% | 2.30% |
| VI | PROGRAM PENGENDALIAN | 100 | 100 | 100.00% | 1,007,622,300 | 977,102,949 | 96.97% | 3.03% |

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|--------------|---|-------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | Target | Realisa | % | Anggaran | Realisasi | % | |
| | PENDUDUK | | | | | | | |
| 13 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 1 | 1 | 100.00% | 235,000,000 | 227,960,000 | 97.00% | 3.00% |
| 14 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00% | 772,622,300 | 749,142,949 | 96.96% | 3.04% |
| VII | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 71.9 | 72.37 | 100.65% | 5,959,601,137 | 5,569,527,444 | 93.45% | 7.15% |
| 15 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 | 12 | 100.00% | 1,554,403,200 | 1,459,519,494 | 93.90% | 6.10% |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 100 | 100 | 100.00% | 2,421,549,937 | 2,367,176,650 | 97.75% | 2.25% |
| 17 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100.00% | 1,651,898,000 | 1,412,831,250 | 85.53% | 14.47% |
| 18 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 | 100 | 100.00% | 331,750,000 | 330,000,050 | 99.47% | 0.53% |
| VII I | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA | 73 | 73 | 100.00% | 4,128,600,000 | 4,082,797,150 | 98.89% | 1.11% |

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|--------------------|--|-------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| | | Target | Realisa | % | Anggaran | Realisasi | % | |
| | SEJAHTERA (KS) | | | | | | | |
| 19 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | 100 | 100.00% | 797,800,000 | 768,947,400 | 96.38% | 3.62% |
| 20 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | 100 | 100.00% | 3,330,800,000 | 3,313,849,750 | 99.49% | 0.51% |
| RATA - RATA | | | | | | | | 4.68% |

Analisis efisiensi atas sumberdaya dalam pencapaian sasaran strategis yang tersaji pada tabel 3.10 kemudian pada tabel 3.11 dianalisis kembali efisiensinya berdasarkan program kegiatan yang mendukung tercapainya program dan sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah mencapai target atas seluruh program dan kegiatan dimana pencapaian kinerja tersebut juga di iringi dengan efisiensi atas penggunaan sumber dana dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 4,68%.

D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah dengan meluncurkan aplikasi SIPANGKAS. SI PANGKAS (System Informasi Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting) merupakan instrumen sederhana secara online yang akan digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk merekam atau mencatat kegiatan-kegiatan pendampingan bagi Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu yang memiliki Bayi dibawah

usia 2 tahun yang nantinya hasil perekaman atau pencatatan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Selain itu instrumen ini kedepannya bisa digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan yang selama ini dilakukan secara fisik atau printout yang membutuhkan ATK yang cukup besar.

Tujuan dari inovasi ini diantaranya Tujuan Inovasi

1. Tersedianya aplikasi online/System Informasi terkait dengan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun.
2. Dalam melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga mampu menginput data sasaran sesuai dengan item-item yang ada dalam aplikasi online.
3. Tersedianya data sasaran pendampingan yaitu : calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun sebesar 75%.
4. Berkurangnya penyebab stunting akibat pola asuh orang tua terhadap anak melalui pendampingan, edukasi, penyuluhan oleh kader TPK.

Berikut beberapa dokumentasi penerapan inovasi SIPANGKAS



**Sosialisasi awal SI PANGKAS di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Takeran*



**Uji coba SI PANGKAS di Balai penyuluhan KB Kecamatan Poncol*

SI PANGKAS

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

PENGERTIAN SI PANGKAS

SI PANGKAS (System Informasi Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting) merupakan instrumen sederhana secara online yang akan digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk merekam atau mencatat kegiatan-kegiatan pendampingan bagi Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu yang memiliki Bayi dibawah usia 2 tahun yang nantinya hasil perekaman atau pencatatan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pengambil

penurunan stunting

KEGIATAN PENDAMPINGAN KELUARGA BERESIKO STUNTING OLEH TPK

TAHUN

Jawaban Anda

BULAN *

Pilih

**Pergisian Aplikasi SIPANGKAS*

The image displays two side-by-side screenshots of the SIPANGKAS application. The left screenshot shows the user profile section with the name 'SI PANGKAS', email 'desir488@gmail.com', and a selection menu where 'PENDAMPINGAN IBU HAMIL' is selected. The right screenshot shows the form for 'PENDAMPINGAN IBU HAMIL' with fields for NIK, Nama, Alamat, Tanggal Kunjungan, Kunjungan ke-, and Usia (Bulan).

**Perngisian Aplikasi SIPANGKAS*

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024 (*dengan foto*)

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak antara lain:

1. BKB Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 atas nama BKB Merpati IX, Kel. Selosari Magetan
2. Juara II Apresiasi Kampung Keluarga Berkualitas Tk. Provinsi Jawa Timur atas nama Kampung KB Desa Bogoarum, Kecamatan Plaosan
3. Juara Harapan I Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik tk. Provinsi Jawa Timur Kategori Pasangan KB Lestari 20 Tahun atas nama Pasangan Ibu Darwati dan Bapak Suparno Nguntoronadi
4. Juara III Praktik Baik Satyagatra tingkat Provinsi Jawa Timurn Tahun 2024 atas nama Satyagatra Sidorejo Berkelas Balai Penyuluhan Kecamatan Sidorejo

5. Juara III Kehadiran Terbanyak Peserta Kelas Orang Tua Hebat Modul BKB Emas Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur
6. Terbaik IV Peserta Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) a.n Sri Hastutik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 6 (enam) sasaran dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Penduduk

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian masih menunggu data realese dari BKKBN Provinsi Jawa Timur
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;

- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Keluarga

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,20% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

- Sasaran ke-3 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja masih menunggu data realese dari BPS Provinsi Jawa Timur
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 4: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak

- Sasaran ke-4 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 130% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-4 didukung oleh 2 (Dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-4 didukung oleh 3 (Tiga) Kegiatan terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 5: Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

- Sasaran ke-5 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 125,57% (kategori Sangat Berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-5 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 87% (kategori Berhasil)
- Sasaran ke-5 didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA

- Sasaran ke-6 terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil)
- Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-6 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-6 didukung oleh 6 (Enam) Kegiatan terdiri dari 6 (Enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2.085 | | |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64.5 | 65.92 | 102.20% |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72.1 | | |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | 0.014 | 130% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % |
|---|--|--------|-----------|-------------------|
| perempuan dan anak | | | | |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0.837 | 0.623 | 125.57% |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87 | 94.83 | 109% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83.95 | 83.99 | 100.05% |

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 6 (Enam) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja diatas 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp16.575.671.180 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 4,68%

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023. Serapan anggaran tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,5 %. Faktor utama yang mendukung hal ini adalah terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan menemui beberapa kendala dan hambatan, diantaranya :

1. Kurang optimalnya intervensi yang kolaboratif dengan perangkat daerah lain dalam pelaksanaan program kegiatan
2. Kurangnya pemahaman tugas kader dan tenaga lini lapangan dikarenakan seringnya pergantian personil.
3. Implementasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena kebijakan belum menysasar dilini bawah

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-

tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Adapun Upaya yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada stakeholder untuk menjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melaksanakan advokasi kepada Kepala Desa agar tetap mempertahankan kader dan lini lapangan yang sudah ada
3. Perlunya Advokasi Kepada Lini Paling Bawah desa dan Pengerak Lapangan terkait PPPA serta adanya regulasi mengenai Kader PPPA / SAPA
4. Meningkatkan advokasi dan edukasi kepada masyarakat agar memperoleh informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2025

| Tujuan & Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rencana Aksi Tahun 2025 |
|--|---|--|
| Tujuan : Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR |
| | Indeks Ketimpangan Gender | Meningkatkan peran serta perempuan dalam semua aspek pembangunan |
| | Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA |

| Tujuan & Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rencana Aksi Tahun 2025 |
|--|---|--|
| Anak | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | - Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. - Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya - Peningkatan kapasitas perempuan dalam Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD |
| Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. |
| Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | % Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA | Memastikan konsistensi atau keselarasan pada setiap dokumen perencanaan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan PA | Meningkatkan pelayanan baik dari sisi sarana dan prasaran, personil pemberi layanan serta kemudahan persyaratan pelayanan |

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Tahun 2025

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2025 | | | | |
|---|--|-------------------|------|------|-------------|-------------|
| | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | | | | 2,08 | 2,08 |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | | | | 65 | 65 |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | | | | 72,15 | 72,15 |
| Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | | | | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 |
| Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | % Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | | | | 0,827 | 0,827 |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP pada Dinas PPKB PP dan PA | | | | 88,5 | 88,5 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB PP dan | | | | 83,97 | 83,97 |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2025 | | | | |
|---------|----------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL |
| | PA | | | | | |

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

KEPALA DINAS PPKB PP DA PA
KABUPATEN MAGETAN



SUWITO AR M Si

Pembina Utama Muda/ IV, C

NIP : 197312291994121001

LAMPIRAN:

A. Matriks Renstra terakhir

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 | 120.000.000 | 100 | 132.000.000 | 100 | 145.000.000 | 300 | 397.000.000 |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 | 120.000.000 | 1 | 132.000.000 | 1 | 145.000.000 | 3 | 397.000.000 |
| | | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|---|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 67.000.000 |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 330.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71,9 | 1.542.000.000 | 72,00 | 1.622.000.000 | 72,10 | 1.785.000.000 | 72,10 | 4.949.000.000 |
| | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 | 982.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 3.082.000.000 |
| | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1378 | 982.000.000 | 1378 | 1.000.000.000 | 1378 | 1.100.000.000 | 4.134 | 3.082.000.000 |
| | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan | 100 | 490.000.000 | 100 | 545.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 1.635.000.000 |
| | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 | 150.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 180.000.000 | 300 | 495.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|--|---|---|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Targ et | Rp. | Targ et | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 30 | 50.000.000 | 35 | 55.000.000 | 40 | 60.000.000 | 105 | 165.000.000 |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 18 | 120.000.000 | 18 | 135.000.000 | 18 | 150.000.000 | 54 | 405.000.000 |
| | | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 445 | 170.000.000 | 470 | 190.000.000 | 520 | 210.000.000 | 1435 | 570.000.000 |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 | 70.000.000 | 100 | 77.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 232.000.000 |
| | | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 6 | 70.000.000 | 6 | 77.000.000 | 6 | 85.000.000 | 18 | 232.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 | 290.000.000 | 73 | 320.000.000 | 73 | 350.000.000 | 73 | 960.000.000 |
| | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 330.000.000 |
| | | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 200 | 100.000.000 | 200 | 110.000.000 | 200 | 120.000.000 | 600 | 330.000.000 |
| | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | 190.000.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 230.000.000 | 100 | 630.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|-------------------------------------|--|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 330.000.000 |
| | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 4 | 165.000.000 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 135.000.000 |
| | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 43 | 200.000.000 | 43 | 220.000.000 | 43 | 240.000.000 | 43 | 660.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|---|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 6 | 165.000.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 6 | 165.000.000 |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | 150.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 180.000.000 | 6 | 495.000.000 |
| | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | 150.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 180.000.000 | 6 | 495.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---|---|--|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100 | 330.000.000 | 100 | 360.000.000 | 100 | 390.000.000 | 100 | 1.080.000.000 |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 330.000.000 | 1 | 360.000.000 | 1 | 390.000.000 | 3 | 1.080.000.000 |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 330.000.000 | 1 | 360.000.000 | 1 | 390.000.000 | 3 | 1.080.000.000 |
| | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) | 76 | 150.000.000 | 76 | 165.000.000 | 76 | 180.000.000 | 76 | 495.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|--|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 150.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 495.000.000 |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 | 150.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 495.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | | - | | - | | - | | 0 |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | | - | | - | | - | 0 | 0 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|--|---|---|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---|----------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | | - | | - | | - | 0 | 0 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,5 | 5.983.388.045 | 80,60 | 6.192.888.045 | 80,70 | 6.451.388.045 | 80,70 | 18.627.664.135 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 14 | 185.000.000 | 14 | 203.500.000 | 14 | 220.000.000 | 42 | 608.500.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 85.000.000 | 8 | 93.500.000 | 8 | 100.000.000 | 24 | 278.500.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 6 | 100.000. | 6 | 110.000. | 6 | 120.000. | 18 | 330.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|--|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | | Perangkat Daerah | | 000 | | 000 | | 000 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 87 | 3.091.388.045 | 87 | 3.093.888.045 | 87 | 3.096.388.045 | 261 | 9.281.664.135 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 | 3.066.388.045 | 22 | 3.066.388.045 | 22 | 3.066.388.045 | 66 | 9.199.164.135 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2 | 25.000.000 | 2 | 27.500.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 82.500.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | 485.000.000 | 12 | 538.000.000 | 12 | 589.500.000 | 36 | 1.612.500.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 12.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 17.000.000 | 36 | 44.000.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 200.000.000 | 12 | 220.000.000 | 12 | 240.000.000 | 36 | 660.000.000 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | 22.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 27.500.000 | 36 | 74.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 30.000.000 | 12 | 33.000.000 | 12 | 36.000.000 | 36 | 99.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|--|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 17.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 22.000.000 | 36 | 59.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 4.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 16.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 200.000.000 | 12 | 220.000.000 | 12 | 240.000.000 | 36 | 660.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | 872.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 950.000.000 | 3 | 2.722.000.000 |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 872.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 950.000.000 | 3 | 2.722.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 1.030.000.000 | 12 | 1.105.000.000 | 12 | 1.210.000.000 | 36 | 3.345.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 165.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|--|--|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 980.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | 12 | 1.150.000.000 | 36 | 3.180.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 163 | 320.000.000 | 163 | 352.500.000 | 163 | 385.500.000 | 489 | 1.058.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 | 95.000.000 | 9 | 105.000.000 | 9 | 115.500.000 | 27 | 315.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 135 | 75.000.000 | 135 | 82.500.000 | 135 | 90.000.000 | 405 | 247.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 19 | 150.000.000 | 19 | 165.000.000 | 19 | 180.000.000 | 57 | 495.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 | 375.000.000 | 100 | 412.500.000 | 100 | 450.000.000 | 300 | 1.237.500.000 |
| | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 | 300.000.000 | 1 | 330.000.000 | 1 | 360.000.000 | 3 | 990.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | 1 | 300.000.000 | 1 | 330.000.000 | 1 | 360.000.000 | 3 | 990.000.000 |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 | 75.000.000 | 1 | 82.500.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 247.500.000 |
| | | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 24 | 75.000.000 | 24 | 82.500.000 | 24 | 90.000.000 | 72 | 247.500.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71,9 | 305.000.000 | 72,00 | 335.500.000 | 72,10 | 370.000.000 | 72,10 | 1.010.500.000 |
| | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam | 12 | 100.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 330.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|--|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | | Pencitraan Program KKBPK | | | | | | | | |
| | | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 330.000.000 |
| | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 | 205.000.000 | 100 | 225.500.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 680.500.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1 | 205.000.000 | 1 | 225.500.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 680.500.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 | 450.000.000 | 73 | 495.000.000 | 73 | 540.000.000 | 73 | 1.485.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|---|---|---|--------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|---|---------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Targ et | Rp. | Targ et | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Presentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | 450.000.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 540.000.000 | 100 | 1.485.000.000 |
| | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 3 | 100.000.000 | 3 | 110.000.000 | 3 | 120.000.000 | 9 | 330.000.000 |
| | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 235 | 300.000.000 | 235 | 330.000.000 | 235 | 360.000.000 | 705 | 990.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------|---------|--|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|-------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 165.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 1 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 76 | 600.000.000 |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 |
| | | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 |
| | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 |
| | | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------------|---------|----------------------|-------------------|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Targ et | Rp. | Targ et | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -18 |
| TOTAL | | | | | 9.945.38 8.045 | | 10.454.8 88.045 | | 11.101.3 88.045 | | 31.501.6 64.135 |

B. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- INSTANSI : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- VISI :
- MISI :
- TUGAS : Membantu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO. | KINERJA UTAMA | | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|------------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------------|
| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | | |
| 1. | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p><i>i</i> = Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun ASFR_{<i>i</i>} = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke <i>i</i></p> | Bidang PPAPS | Dinas PPKB PP dan PA |

| NO. | KINERJA UTAMA | | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | | |
| 2. | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | $iBangga = \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan Keluarga}) \times 100$ | BKKBN | Dinas PPKB PP dan PA |
| 3. | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | $IDG = \frac{1}{3} \times (E + P + I)$ $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{P_{prof} + P_{manaj}}{2} + \frac{K_{perempuan}}{K_{total}} + \frac{Y_{perem}}{Y_{laki-laki}} \right)$ <ul style="list-style-type: none"> • E (Indeks Partisipasi Ekonomi) P_{prof} = Proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional dan teknis P_{manaj} = Proporsi perempuan dalam pekerjaan administratif dan manajerial • P (Indeks Partisipasi Politik) $K_{perempuan}$ = Jumlah kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan K_{total} = Jumlah total kursi parlemen • I (Indeks Penguasaan Sumber Daya Ekonomi) $Y_{perempuan}$ = Pendapatan Perkapita Perempuan yang disesuaikan $Y_{laki-laki}$ = Pendapatan Perkapita Laki-laki yang disesuaikan | BPS Provinsi Jawa Timur | Dinas PPKB PP dan PA |

| NO. | KINERJA UTAMA | | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------|----------------------|
| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | | |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ | Bidang PPPA | Dinas PPKB PP dan PA |
| 5. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | % Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | $\frac{\text{Jumlah Anak yang Tidak Terpenuhi Hak nya}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$ | Bidang PPPA | Dinas PPKB PP dan PA |

Magetan, Juli 2024
Plt Kepala Dinas PPKB PP dan PA
Kabupaten Magetan



Ir. MIFTAHUDDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19671026 199302 1 001

C. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|--|----------------|------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta | 43 | % | 170.000.000 |
| Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan KebijakanrnPengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 50.000.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 50.000.000 |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 120.000.000 |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 120.000.000 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan | 100 | korban | 300.000.000 |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 300.000.000 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 300.000.000 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Untuk Tercapainya KLA | 76 | % | 100.000.000 |
| Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota | 1 | Dokumen | 100.000.000 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 | Organisasi | 100.000.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan | 1 | kegiatan | 200.000.000 |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan | 1 | kegiatan | 120.000.000 |
| Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu | 1 | Kegiatan | 120.000.000 |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Managemen Peningkatan SDM | 1 | kegiatan | 80.000.000 |
| Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK | 1 | Kegiatan | 80.000.000 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kepuasan ASN Dinas PPKB PP dan PA terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PPKB PP dan PA | 80 | Skor | 5.415.787.500 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 14 | Dokumen | 128.803.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | Dokumen | 50.000.000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | Laporan | 78.803.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 87 | % | 2.779.113.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 308 | Orang/bulan | 2.754.113.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 | Laporan | 25.000.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | Paket | 430.421.500 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 12.000.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|--|----------------|---------|---------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 195.421.500 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | Paket | 22.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 30.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 17.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 4.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 150.000.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan | 1 | Unit | 872.000.000 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 872.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | Laporan | 967.150.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 45.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 922.150.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 164 | Unit | 238.300.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 | Unit | 85.500.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 142 | Unit | 77.800.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 | Unit | 75.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan | 100 | % | 1.007.622.300 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|---|----------------|----------|----------------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 | Kegiatan | 235.000.000 |
| Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | 1 | Kegiatan | 235.000.000 |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 1 | Dokumen | 772.622.300 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 | Laporan | 15.000.000 |
| Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 1 | Dokumen | 75.000.000 |
| Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 | Laporan | 204.600.000 |
| Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 | Dokumen | 375.796.800 |
| Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 24 | Unit | 102.225.500 |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Prosentase Capaian CPR | 71 | % | 5.959.601.137 |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | 12 | Dokumen | 1.554.403.200 |
| Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 | Laporan | 140.000.000 |
| Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 20 | Laporan | 684.403.200 |
| Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga | 1 | Laporan | 270.000.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|--|---|----------------|------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | |
| Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 | Dokumen | 60.000.000 |
| Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 2 | Dokumen | 150.000.000 |
| Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 29 | Organisasi | 250.000.000 |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 | % | 2.421.549.937 |
| Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1378 | Orang | 1.066.582.937 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1 | Laporan | 1.354.967.000 |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan | 100 | % | 1.651.898.000 |
| Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 2 | Laporan | 27.800.000 |
| Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 | Orang | 1.338.448.000 |
| Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 20 | Laporan | 30.000.000 |
| Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 8 | Unit | 130.000.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|---|----------------|------------|----------------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 445 | Orang | 100.000.000 |
| Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 | Laporan | 25.650.000 |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 | % | 331.750.000 |
| Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 6 | Organisasi | 50.000.000 |
| Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 1 | Dokumen | 7.932.000 |
| Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 49 | Kampung | 273.818.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga | 73 | % | 4.128.600.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | % | 797.800.000 |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 200 | Keluarga | 50.000.000 |
| Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui | 8 | Laporan / | 172.800.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|---|----------------|------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Keluarga Sejahtera (PPKS) | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | Dokumen | |
| Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 | Laporan | 35.000.000 |
| Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia | 25 | Unit | 300.000.000 |
| Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 235 | Orang | 200.000.000 |
| Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 3 | Kelompok | 40.000.000 |
| Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 | % | 3.330.800.000 |
| Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 | Laporan | 25.000.000 |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | Organisasi | 25.000.000 |
| Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 | Laporan | 30.000.000 |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target kinerja | | Anggaran |
|---|---|----------------|---------|-----------------------|
| | | Volume | Satuan | |
| Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 10 | laporan | 1.548.000.000 |
| Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 10 | laporan | 1.702.800.000 |
| TOTAL | | | | 17.281.610.937 |

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Teuku Umar No.55 Magetan Kode Pos 63351
Telp. 0351 – 123456 faks (0351) 123456
Email: dppkbpppa@magetankab.go.id website: <https://dppkbpppa.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. HERGUNADI, MT.

Pihak Pertama,

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740206 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | 2,085 Angka |
| 2. | Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) | 24,80 angka |
| 3. | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 80,81 angka |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | a. Rasio KDRT b. Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | a. 0,02 – 0,05 angka b. 715 Skor |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82,20 Skor |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------------|--|--------------------------|------------|
| 1 | Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Rp 170.000.000 | - |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rp 300.000.000 | - |
| 3 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Rp 100.000.000 | - |
| 4 | Program Perlindungan Khusus Anak | Rp 200.000.000 | - |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.604.581.805 | - |
| 6 | Program Pengendalian Penduduk | Rp 965.396.800 | - |
| 7 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rp 5.959.601.137 | - |
| 8 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Rp 4.128.600.000 | - |
| JUMLAH | | Rp 17.428.179.742 | |

Magetan, Januari 2024



I. HERGUNADI, MT.

Plt. KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
 KABUPATEN MAGETAN


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740206 200003 1 004

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Teuku Umar No.55 Magetan Kode Pos 63351

Telp. 0351 – 123456 faks (0351) 123456

Email: dppkbpppa@magetankab.go.id website: <https://dppkbpppa.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWITO, AP, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, S.E., M.M

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, November 2024

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E., M.M

Pihak Pertama,

SUWITO, AP, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19731229 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 |
|-----|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 Angka |
| 2. | Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,50 angka |
| 3. | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72,10 angka |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 angka |
| 5. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837% |
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | a. Nilai SAKIP | 87,00 Skor |
| | | b. Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 Skor |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--|------------------|------------|
| 1 | Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Rp 170.000.000 | - |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rp 300.000.000 | - |
| 3 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Rp 100.000.000 | - |
| 4 | Program Perlindungan Khusus Anak | Rp 200.000.000 | - |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.415.787.500 | - |
| 6 | Program Pengendalian Penduduk | Rp 1.007.622.300 | - |
| 7 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rp 5.959.601.137 | - |
| 8 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Rp 4.128.600.000 | - |

JUMLAH Rp 17.281.610.937

Magetan, November 2024

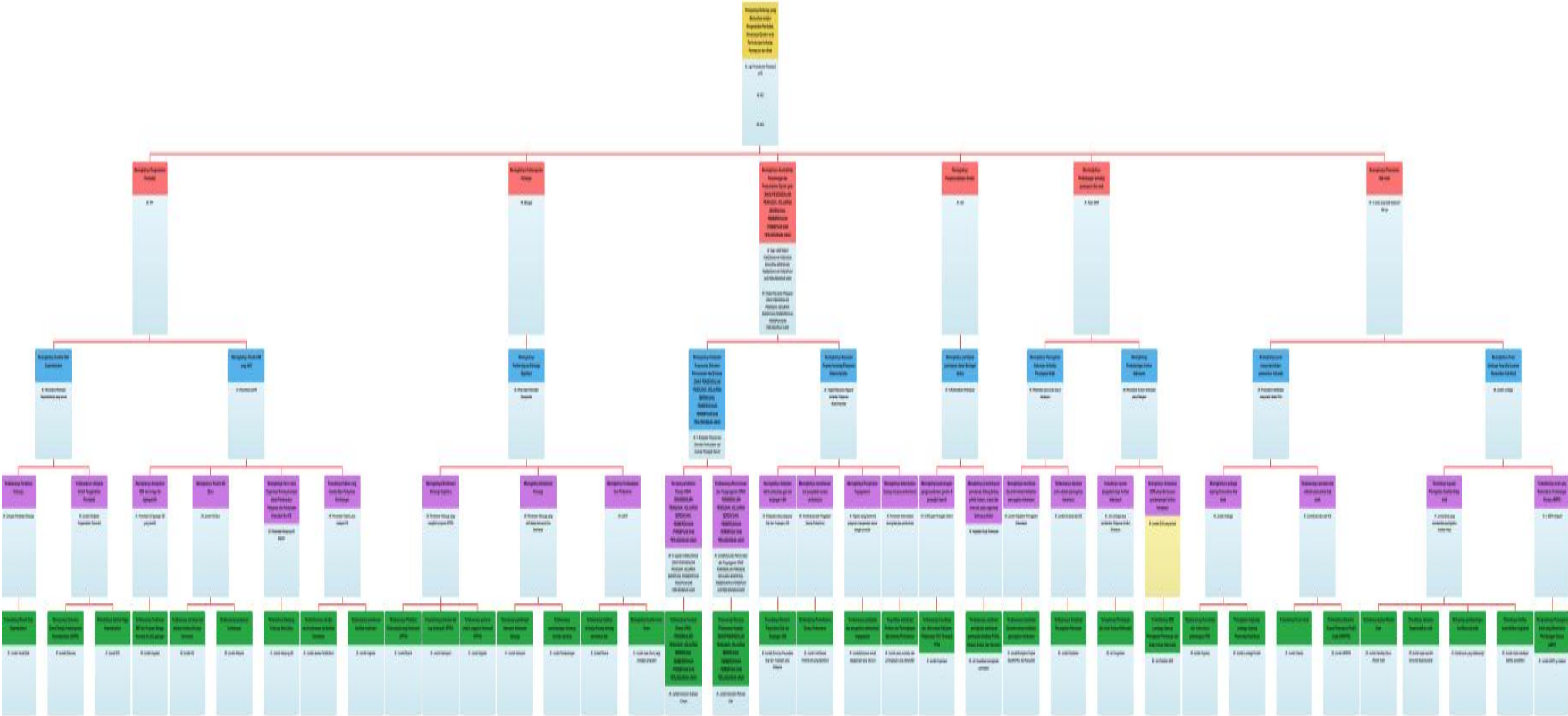


E. Pengukuran Kinerja

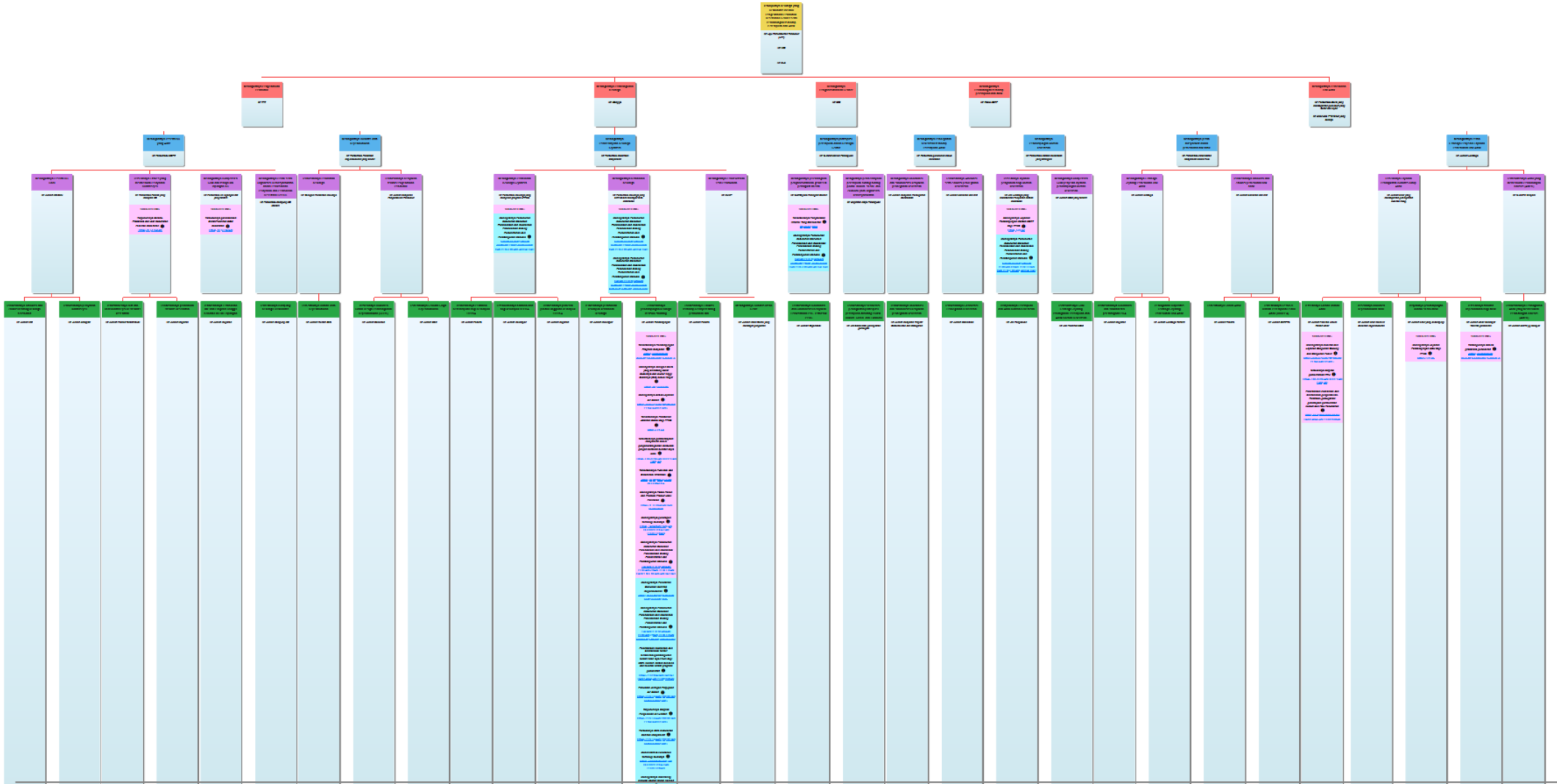
Hasil capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % | Kategori |
|---|--|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | 2,085 | | | |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 64,5 | 65,92 | 102,20% | Sangat Baik |
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 72,1 | | | |
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | 0,02 – 0,05 | 0,014 | 130% | Sangat Baik |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya | 0,837 | 0,623 | 125,57% | Sangat Baik |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas PPKB PP dan PA | Nilai SAKIP | 87 | 94,83 | 109% | Sangat Baik |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 83,99 | 100,05% | Sangat Baik |

F. Pohon Kinerja



G. Crosscutting



Crosscutting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan :

| NO | OPD | CROSSCUTTING |
|-----------|--|--|
| 1 | Dinas Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Kesehatan |
| | | Pelatihan tenaga medis pelayanan kontrasepsi (CTU) |
| | | Upaya percepatan penurunan stunting |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembentukan Kampung KB |
| | | Pembentukan kelompok bina ketahanan keluarga |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penyediaan data kependudukan |
| | | Penerbitan dokumen kependudukan anak |
| 4 | Dinas Sosial | Pendampingan korban kekerasan |
| | | Upaya percepatan penurunan stunting |
| | | Pendampingan konflik sosial anak |
| 5 | Dinas Peternakan dan Perikanan | Upaya percepatan penurunan stunting |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan | Upaya percepatan penurunan stunting |
| | | Pemenuhan Sarana yang ramah anak |
| 7 | Bappeda Litbang | Upaya percepatan penurunan stunting |
| 8 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Upaya percepatan penurunan stunting |
| | | Penyediaan fasilitas kependidikan |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Upaya percepatan penurunan stunting |
| | | Pemenuhan Sarana yang ramah anak |
| 10 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan | Upaya percepatan penurunan stunting |
| 11 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pemenuhan Sarana yang ramah anak |
| | | Upaya percepatan penurunan stunting |
| 12 | Seluruh OPD | Perencanaan Anggaran Responsif Gender |

H. Cascading

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| KEPALA DAERAH | Tujuan RPJMD | Meningkatkan Kualitas SDM <i>Indeks Pembangunan Manusia</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran RPJMD | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat <i>Indeks Kesehatan</i> | | | | | | | | | | | | | |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | Tujuan Perangkat Daerah | Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LPP, IKG, KLA | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Perangkat Daerah | Meningkatnya Pengendalian Penduduk <i>TFR</i> | Meningkatnya Pembangunan Keluarga <i>ibnaga</i> | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender <i>IDG</i> | Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak <i>Rasio KDRT</i> | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | | | | | | | | | |
| KEPALA BIDANG | Program | Program Pengendalian Penduduk <i>Persentase Ketersediaan Data Kependudukan</i> | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) <i>Persentase Capaian CPR</i> | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera <i>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</i> | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan <i>% Perempuan di Lembaga</i> | Program Perlindungan Perempuan <i>Terlayannya Jumlah Korban Kekerasan Kepada Perempuan</i> | Program Perlindungan Khusus Anak <i>Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan</i> | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) <i>Skor KLA</i> | | | | | | | |
| | | Kegiatan | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pendeendalian Kuantitas Penduduk | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /kota | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasarakatan Kewenangan Kabupaten /kota | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota |
| KEPALA SEKSI | Anggaran | 235.000.000 | 730.396.800 | 1.554.403.200 | 1.121.582.937 | 2.951.885.000 | 331.750.000 | 797.800.000 | 3.330.800.000 | 50.000.000 | 120.000.000 | 300.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 | 100.000.000 |